



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	x
ABSTRACT	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak	
1. Pengertian Pajak	16
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak	18
3. Fungsi Pajak	20
4. Asas Pemungutan Pajak	21
5. Pengelompokan Pajak	24
6. Sistem Pemungutan Pajak	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah	
1. Pengertian Pajak Daerah	29
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah	31
3. Jenis-Jenis Pajak Daerah	33
C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah	
1. Pengertian Peraturan Daerah	34
2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah	35



D. Tinjauan Umum Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

1. Pengertian BPHTB	39
2. Prinsip Pemungutan BPHTB	40
3. Subyek BPHTB	42
4. Obyek BPHTB	42
5. Pengecualian dan Pengenaan BPHTB	45
6. Saat Terutangnya BPHTB	46
7. Dasar Pengenaan BPHTB	47
8. Tarif BPHTB	48

E. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

1. Dasar Hukum Keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	49
2. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	49
3. Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	50
4. Kewajiban, Hak dan Larangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	52

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian	55
B. Jenis Penelitian	56
C. Alat dan Cara Penelitian	60
D. Analisis Hasil	60
E. Hambatan dan Cara Mengatasinya	61

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Pringsewu Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Sejak 1 Januari 2011)	64
1. Hasil Penelitian	64



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PELAKSANAAN PUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) SETELAH DIBERLAKUKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN PRINGSEWU**

RUTH ROSIANA, Dwi Haryati, S.H., M.H

Universitas Gadjah Mada, 2011 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

2. Pembahasan	74
B. Perlindungan Kepentingan Hak-Hak Wajib Pajak BPHTB yang Mendapat Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
1. Hasil Penelitian	100
2. Pembahasan	107
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran-Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	